



# SIARAN PERS

Tanggal: 20 November 2024

## Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Jombang Petakan 26 Indikator Potensi TPS Rawan

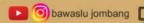
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang --- Bawaslu Jombang petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 5 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 5 indikator yang banyak terjadi, 8 indikator yang tidak banyak terjadi dan 8 indikator yang belum pernah terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 26 indikator, diambil dari sedikitnya 306 kelurahan/desa di Kabupaten Jombang yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politisasi SARA. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

#### 5 (Lima) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

- 1) 804 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;
- 2) 778 Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;
- 3) 162 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
- 160 Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 5) 109 Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK);















### 5 (Lima) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

- 1) 35 Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
- 2) 29 Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;
- 3) 16 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
- 4) 13 TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);
- 5) 12 Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);

## 8 (Delapan) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

- 1) 10 Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu;
- 2) 9 TPS di lokasi khusus;
- 3) 6 TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
- 4) 4 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
- 5) 4 Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan;
- 6) 2 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
- 7) 2 Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
- 8) 1 TPS didirikan di wilayah rawan konflik;

#### Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan khususnya di Kabupaten Jombang untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Kabupaten Jombang melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.





Bawaslu Kabupaten Jombang juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

#### Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Jombang merekomendasikan KPU Kabupaten Jombang untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.













## Lampiran

## Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kecamatan

|    | Indikator   | Jumlah<br>TPS | TPS Rawan Paling Banyak                          |
|----|---|---------------|--|
| 1. | TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;  | 804           | Mojowarno, Jombang, Bareng,                      |
| 2. | Terdapat pemilih disabilitas<br>yang terdaftar pada DPT di<br>TPS;  | 778           | Mojowarno, Gudo, Ngoro                           |
| 3. | TPS yang terdapat Pemilih<br>Tambahan (DPTb);   | 162           | Jombang, Diwek, Mojowarno,<br>Sumobito           |
| 4. | Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;                                       | 160           | Mojowarno, Jombang, Diwek                        |
| 5. | Terdapat Potensi Pemilih<br>Memenuhi Syarat, namun tidak<br>Terdaftar di DPT (Potensi<br>DPK);  | 109           | Peterongan, Perak, Jogoroto                      |
| 6. | Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;   | 35            | Bareng, Plandaan, Ngusikan,<br>Wonosalam         |
| 7. | Memiliki riwayat kekurangan<br>atau kelebihan dan bahkan<br>tidak tersedia logistik<br>pemungutan dan penghitungan<br>suara pada saat Pemilu; | 29            | Ngoro, Wonosalam, Jombang,<br>Sumobito, Jogoroto |
| 8. | TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;   | 16            | Peterongan, Sumobito, Mojoagung,                 |
| 9. | TPS didirikan di wilayah rawan<br>bencana (contoh: banjir, tanah<br>longsor, gempa);  | 13            | Sumobito, Mojoagung                              |
| 10 | D. Terdapat Riwayat Pemungutan<br>Suara Ulang (PSU) dan/atau<br>Penghitungan Surat Suara<br>Ulang (PSSU);                                     | 12            | Mojowarno, Perak                                 |











| 11. | Memiliki riwayat logistik<br>pemungutan dan penghitungan<br>suara mengalami kerusakan<br>untuk di TPS pada saat Pemilu;                       | 10 | Ngoro, Jombang, Bareng, Diwek,<br>Kesamben |
|-----|---|----|--|
| 12. | TPS di lokasi khusus;   | 9  | Jombang, Diwek                             |
| 13. | TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;  | 6  | Mojoagung, Peterongan                      |
| 14. | TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);  | 4  | Plandaan                                   |
| 15. | Memiliki riwayat terjadi<br>intimidasi kepada<br>penyelenggara Pemilihan;   | 4  | Perak                                      |
| 16. | TPS di dekat wilayah kerja<br>(pertambangan, pabrik)  | 2  | Ngoro, Bareng                              |
| 17. | Memiliki riwayat keterlambatan<br>pendistribusian logistik<br>pemungutan dan penghitungan<br>suara di TPS (maksimal H-1)<br>pada saat pemilu; | 2  | Mojowarno                                  |
| 18. | TPS didirikan di wilayah rawan konflik;   | 1  | Peterongan                                 |





